

**TINJAUAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN
PENYETORAN, PPh PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BADIKLAT PKN BPK RI**

Oleh
Harsanti Riskia Azzahra Surastian

Abstrak

Perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Pajak terbesar di Indonesia berasal dari pajak penghasilan pribadi pegawai dan bukan pegawai. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diperoleh orang pribadi dalam negeri. Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu penerima penghasilan yang dikenakan potongan PPh Pasal 21. Tujuan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sistem penghitungan serta pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Badiklat PKN BPK dan PPh RI. Berdasarkan penulisan laporan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak khususnya pajak penghasilan atas Pegawai Negeri Sipil mulai dari perhitungan, pemotongan, hingga penyetoran pajak telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, Pegawai Negeri Sipil

**REVIEW THE IMPLEMENTATION OF THE CALCULATIONS,
WITHHOLDING, AND PAYMENT OF INCOME TAX ARTICLE 21 OF THE
CIVIL SERVANT AT THE BADIKLAT PKN BPK RI**

By

Harsanti Riskia Azzahra Surastian

Abstract

Taxation is one of the largest sources of revenue in Indonesia. The largest tax in Indonesia comes from the personal income tax of employees and non-employees. One of the taxes levied by the government is income tax article 21 (PPh 21). Article 21 income tax is a tax imposed on income from salaries, wages, honorarium, allowances and other payments earned by domestic individuals. Civil Servants are one of the income recipients who are subject to Article 21 Income Tax deductions. The purpose of this final report is to find out the system for calculating and withholding and depositing Income Tax Article 21 for Civil Servants carried out by Badiklat PKN BPK RI. Based on the writing report, it can be concluded that the application of taxes, especially income taxes on government employees, from calculation, withholding, to the payment of tax has been implemented accordance with the Law No. 36 of 2008.

Keywords : Income Tax, Article 21 Income Tax, Goverment Employees.